

ABSTRAK

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam memberikan kepastian hukum bagi para pemilik bidang tanah. Dalam pelaksanaannya dilakukan pengumpulan dan pengelolaan data fisik salah satunya kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah. Tetapi kegiatan pengukuran dan pemetaan yang dilakukan di desa Sebani kecamatan Sumobito kabupaten Jombang dan dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tidak sesuai dengan aturan pada PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PERMEN No. 3 Tahun 1997 sebagai ketentuan pelaksanaan pendaftaran tanah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memaparkan pelaksanaan pengukuran tanah sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah elektronik dan mengetahui akibat hukumnya pengukuran tanah sebagai dasar terbitnya sertifikat tanah elektronik di Kantor Kabupaten Jombang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) yang dilakukan dengan mengadakan penelitian dilokasi dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan prilaku dalam arti fakta (*das sein*).

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah di desa Sebani kecamatan Sumobito kabupaten Jombang tidak sesuai dengan PERMEN ATR/K.BPN No. 3 Tahun 1997 terkait aturan teknis dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan Sehingga menghambat proses validasi data hasil pengukuran dan pemetaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang untuk dilakukannya alih media/scan yang nantinya sebagai dasar terbitnya sertifikat elektronik menjadi dokumen elektronik. Akibat hukum atas ketidaksesuaian tersebut oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang tidak bisa memvalidasi data dari hasil pengukuran dan pemetaan sebagai syarat terbitnya sertifikat elektronik. Sehingga memberikan kerugian pada masyarakat desa Sebani yang tidak bisa mendapatkan sertifikat elektronik.

Kata Kunci : *Pendaftaran Tanah – Pengukuran - Sertifikat elektronik*

ABSTRACT

The implementation of land registration in Indonesia is carried out based on laws and regulations in providing legal certainty for owners of land parcels. In its implementation, the collection and management of physical data, one of which is the measurement and mapping of land parcels. of land parcels. However, the measurement and mapping activities carried out in Sebani village, Sumobito sub-district, Jombang district and within the scope of the Jombang District Land Office are not in accordance with the regulations in Government Regulation No. PP. Jombang District Land Office are not in accordance with the rules in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and Ministerial Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration. 1997 on Land Registration and PERMEN No. 3 of 1997 as provisions for implementing land registration. implementing the land registration. Therefore, this research was conducted to describe the implementation of land measurement as the basis for the issuance of electronic land certificates electronic land certificate and to find out the legal consequences of land measurement as the basis for the issuance of electronic land certificates at the Jombang District Office.

Methods The research method used in this research is empirical law. With using a fact approach (fact approach) which is done by conducted by conducting on-site research and guided by laws and regulations and other library materials. and other library materials that aim to find methods, norms or das sollen and behavior in the sense of facts (das sein). sollen and behavior in the sense of fact (das sein).

The results of this study indicate that the implementation of the implementation of measurement and mapping of land parcels in Sebani village, Sumobito sub district Jombang district is not in accordance with PERMEN ATR / K.BPN No. 3 of 1997 related to technical rules in measurement and mapping activities. technical rules in measurement and mapping activities, thus hindering the process of validating the data validation of the results of measurement and mapping by the Land Office of Jombang Regency for media transfer / mapping. Jombang to do media transfer / scan which will be the basis for the issuance of electronic certificates into electronic documents. issuance of electronic certificates into electronic documents. The legal consequences of this discrepancy by Jombang District Land Office cannot validate data from the results of measurement and mapping as a requirement for the issuance of electronic certificates into electronic documents. measurement and mapping as a condition for the issuance of electronic certificates. So that it gives losses to the Sebani village community who cannot get an electronic certificate get an electronic certificate.

Key Words : *Registration Land Registration - Measurement -
Electronic Certificate*